

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Penanggulangan Abrasi

* Yoga Yustioriawan¹, Sylvina Rusadi²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : yogayustioriawan@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis dalam penanggulangan bencana abrasi di wilayah pesisir. Abrasi yang terjadi secara berkelanjutan telah menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan, infrastruktur, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan penentuan informan secara purposive. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Bengkalis telah menjalankan perannya melalui fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan kebijakan kebencanaan pada tahap mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, pelaksanaan tersebut belum optimal karena adanya kendala berupa keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta partisipasi masyarakat guna mendukung efektivitas penanggulangan abrasi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Penanggulangan Bencana, Abrasi

Abstract

This study aims to analyze the role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Bengkalis Regency in mitigating coastal abrasion. Continuous abrasion has had a significant impact on the environment, infrastructure, and socio-economic conditions of the community. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation, with informants being selected purposively. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the BPBD of Bengkalis Regency has carried out its role through the function of coordination, facilitation, and implementation of disaster policies at the stages of mitigation, emergency response, and rehabilitation and reconstruction. However, this implementation has not been optimal due to constraints such as limited budget, facilities and infrastructure, and low community participation. Therefore, it is necessary to strengthen inter-agency coordination, increase institutional capacity, and community participation to support the effectiveness of sustainable abrasion mitigation.

Keywords: Role, Regional Disaster Management Agency, Disaster Management, Coastal Erosion.

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan garis pantai lebih dari 99.000 kilometer, Indonesia memiliki potensi sumber daya pesisir yang luar biasa. Ekonomi negara berpusat di wilayah pesisir, yang mencakup perikanan, transportasi laut, dan pariwisata. Namun, faktor alam yang ekstrem dan aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan menempatkan tekanan yang signifikan pada wilayah ini. Abrasi pantai, yang merupakan pengikisan daratan oleh gelombang laut, arus, dan pasang surut yang terus-menerus dan semakin parah karena perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, adalah salah satu efek yang paling signifikan (Palisu et al., 2020).

Sebagai informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), abrasi telah menghancurkan lebih dari 100.000 hektare wilayah pesisir Indonesia dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Indonesia mengatur secara menyeluruh penanggulangan bencana, menegaskan bahwa pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha bertanggung jawab untuk mengurangi risiko bencana. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Bencana bukan hanya peristiwa seperti gempa bumi, banjir, atau gunung meletus; mereka juga mencakup bencana ekologis seperti abrasi pantai. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga menekankan betapa pentingnya keberlanjutan ekosistem pesisir untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan tindakan manusia yang merusak garis pantai.

Penanggulangan abrasi membutuhkan pendekatan terpadu dan strategis yang melibatkan elemen partisipatif, teknis, dan regulasi. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai strategi, baik yang struktural (misalnya, pembangunan pemecah gelombang, revetmen, dan penanaman mangrove) maupun non-struktural (misalnya, peraturan zonasi wilayah pesisir dan kampanye edukasi lingkungan) (Ima Nurmalia Permatasari, 2021).

Dengan demikian untuk menjaga ruang hidup masyarakat pesisir, abrasi harus dipandang sebagai masalah multidimensional yang membutuhkan kerja sama yang berkelanjutan. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagian besar bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengendalian dan penanggulangan bencana di wilayah pesisir, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ini membuat daerah bertanggung jawab langsung untuk menangani dan menangani ancaman seperti abrasi pantai.

Karena lokasinya yang strategis, Kabupaten Bengkalis rawan terhadap abrasi karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan dikelilingi oleh air yang bergerak cepat. Karakteristik-karakteristik ini menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai contoh tantangan yang sulit untuk menangani bencana abrasi dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) (Astuti et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis dalam penanggulangan abrasi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan serta mengungkap dinamika sosial, kelembagaan, dan kebijakan yang terjadi dalam proses penanggulangan bencana abrasi di wilayah pesisir.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis, dengan fokus pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta wilayah pesisir yang terdampak abrasi,

khususnya di Desa Muntai. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan daerah yang mengalami abrasi secara signifikan dan berulang setiap tahunnya, sehingga relevan dengan tujuan penelitian.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam penanggulangan abrasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari unsur BPBD Kabupaten Bengkalis sebagai informan kunci, serta masyarakat pesisir sebagai informan pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif dan valid.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian, dengan tujuan untuk menghasilkan temuan yang sistematis, akurat, dan dapat menggambarkan secara utuh peran BPBD dalam penanggulangan abrasi beserta faktor pendukung dan penghambatnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis dalam penanggulangan abrasi di wilayah pesisir. Analisis dilakukan berdasarkan tiga indikator utama menurut Mintzberg dalam (Suryani, 2021) , yaitu peran antarpribadi, peran informasional, dan peran pengambilan keputusan, serta didukung dengan identifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

1. Peran Antarpribadi

Peran antarpribadi, suatu kondisi dimana atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar, Mintzberg dalam (Suryani, 2021).

BPBD Kabupaten Bengkalis menunjukkan peran antarpribadi melalui aktivitas koordinasi dengan instansi terkait serta interaksi langsung dengan masyarakat pesisir. BPBD berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi serta menindaklanjuti permasalahan abrasi yang terjadi. Kegiatan koordinasi dilakukan dalam bentuk kerja sama lintas sektor, terutama dalam pelaksanaan sosialisasi dan penanganan dampak abrasi. Hal ini menunjukkan bahwa BPBD telah menjalankan fungsi sebagai fasilitator dalam membangun hubungan kelembagaan, meskipun belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau seluruh wilayah terdampak.

2. Peran Informasional

Peran informasional, merupakan fungsi kunci pemimpin sebagai pengumpul, penyebar, dan penyaji informasi, agar membantu organisasi mengambil Keputusan yang tepat dan berkomunikasi efektif dengan pihak internal dan eksternal, Mintzberg dalam (Suryani, 2021).

Dalam aspek informasional, BPBD Kabupaten Bengkalis berperan dalam mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi terkait kondisi abrasi kepada masyarakat. Informasi tersebut disampaikan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi

kebencanaan, serta penyampaian data wilayah rawan abrasi. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran informasi belum dilakukan secara merata. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami prosedur penanggulangan bencana dan mekanisme pelaporan kejadian abrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa peran informasional BPBD masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemerataan akses informasi kepada masyarakat pesisir.

3. Peran Pengambilan Keputusan

Peran pengambilan keputusan, dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang dipimpinnya, Mintzberg dalam (Suryani, 2021).

BPBD Kabupaten Bengkalis juga berperan dalam pengambilan keputusan terkait penanggulangan abrasi, baik pada tahap mitigasi, tanggap darurat, maupun pascabencana. BPBD melakukan berbagai upaya seperti penyaluran bantuan logistik, koordinasi penanganan darurat, serta rehabilitasi infrastruktur yang terdampak abrasi. Selain itu, BPBD juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi, seperti penanaman mangrove sebagai bentuk perlindungan wilayah pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa BPBD telah terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan strategis, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Selain melihat peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis dalam penanggulangan abrasi, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas tersebut di lapangan. Faktor-faktor ini meliputi unsur pendukung yang mendorong keberhasilan program, serta unsur penghambat yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangan abrasi secara optimal.

Dalam pelaksanaan penanggulangan abrasi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja BPBD Kabupaten Bengkalis. Faktor pendukung meliputi adanya kerja sama antarinstansi serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah yang memfasilitasi pelaksanaan program penanggulangan abrasi. Namun demikian, terdapat pula faktor penghambat yang cukup signifikan, yaitu keterbatasan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun BPBD telah menjalankan perannya, efektivitas pelaksanaan penanggulangan abrasi masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan keterlibatan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis telah menjalankan perannya dalam penanggulangan abrasi melalui aspek peran antarpribadi, peran informasional, dan peran pengambilan keputusan. Pada aspek antarpribadi, BPBD telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta menjalin komunikasi dengan masyarakat pesisir. Pada aspek informasional, BPBD telah melaksanakan penyebaran informasi melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kebencanaan, meskipun belum merata. Sementara itu, pada aspek pengambilan keputusan, BPBD telah terlibat dalam berbagai upaya strategis, mulai dari mitigasi, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi. Di sisi lain, terdapat faktor pendukung berupa adanya kerja sama antarinstansi serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi sumber daya, serta penguatan partisipasi masyarakat guna meningkatkan efektivitas penanggulangan abrasi secara berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P., Cahyati, F., Febrianto, A., Riau, U. I., Pantai, K., & Pesisir, W. (2024). *Strategi penanganan kerusakan wilayah pesisir akibat bencana abrasi di pesisir utara kecamatan bantan kabupaten bengkalis*. 12(02), 43–60.
- Ima Nurmalia Permatasari. (2021). Kajian Resiko, Dampak, Kerentanan dan Mitigasi Bencana Abrasi Dibeberapa Pesisir Indonesia. *Jurnal Riset Kelautan Tropis (Journal Of Tropical Marine Research) (J-Tropimar)*, 3(1), 56. <https://doi.org/10.30649/jrkt.v3i1.56>
- Mintzberg, H. (1973). *The nature of managerial work*. New York: Harper & Row.
- Palisu, B. J., Kelautan, D. T., & Hasanuddin, U. (2020). *Masyarakat Pesisir Di Indonesia*. 5(2), 148–152.
- Suryani, N. K., Riswandi, P., Hasbi, I., & Rochmi, A. (2021). *Pengantar Manajemen dan Bisnis* (hlm. 17). Widina Bhakti Persada.
- Farhan Ubaidillah Al Haqiqi, & Widyastuty, S. A. (2023). Tingkat Pemahaman Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberadaan Hutan Mangrove Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Abrasi. *Waktu*, 21(01), 43–51. <https://doi.org/10.36456/waktu.v21i01.792>